

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH

3.1 Letak Geografis dan Administratif

Letak geografis merupakan posisi pada suatu wilayah yang terdapat di permukaan bumi yang dimana letak geografis ini ditentukan berdasarkan koordinat lintang dan bujur. Letak geografis ini dapat mempengaruhi berbagai aspek seperti iklim, sumber daya alam, dan aktivitas manusia yang terdapat di suatu wilayah. Letak administratif suatu wilayah merupakan garis pemisah yang dapat menandai kewenangan pemerintahan seperti kabupaten/kota, dan desa. Administratif ini menjadi hal yang sangat penting dalam pengelolaan tata ruang, pengatur populasi, dan penyelenggaraan pelayanan publik, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti sengketa antar wilayah yang nantinya dapat mempengaruhi pembangunan dan stabilitas wilayah. Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Pekalongan terletak di sepanjang pantai Laut Utara yang berbatasan langsung Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan di sebelah Timur, secara geografis Kabupaten Pekalongan berada di antara 6 – 7 23' Lintang Selatan dan 109 – 109 78' Bujur Timur. Batas administrasi Kabupaten Pekalongan dapat dilihat di bawah ini:

- Sebelah Utara : Laut Jawa dan Kota Pekalongan
- Sebelah Selatan: Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan
- Sebelah Timur : Kabupaten Banjarnegara
- Sebelah Barat : Kabupaten Pemalang

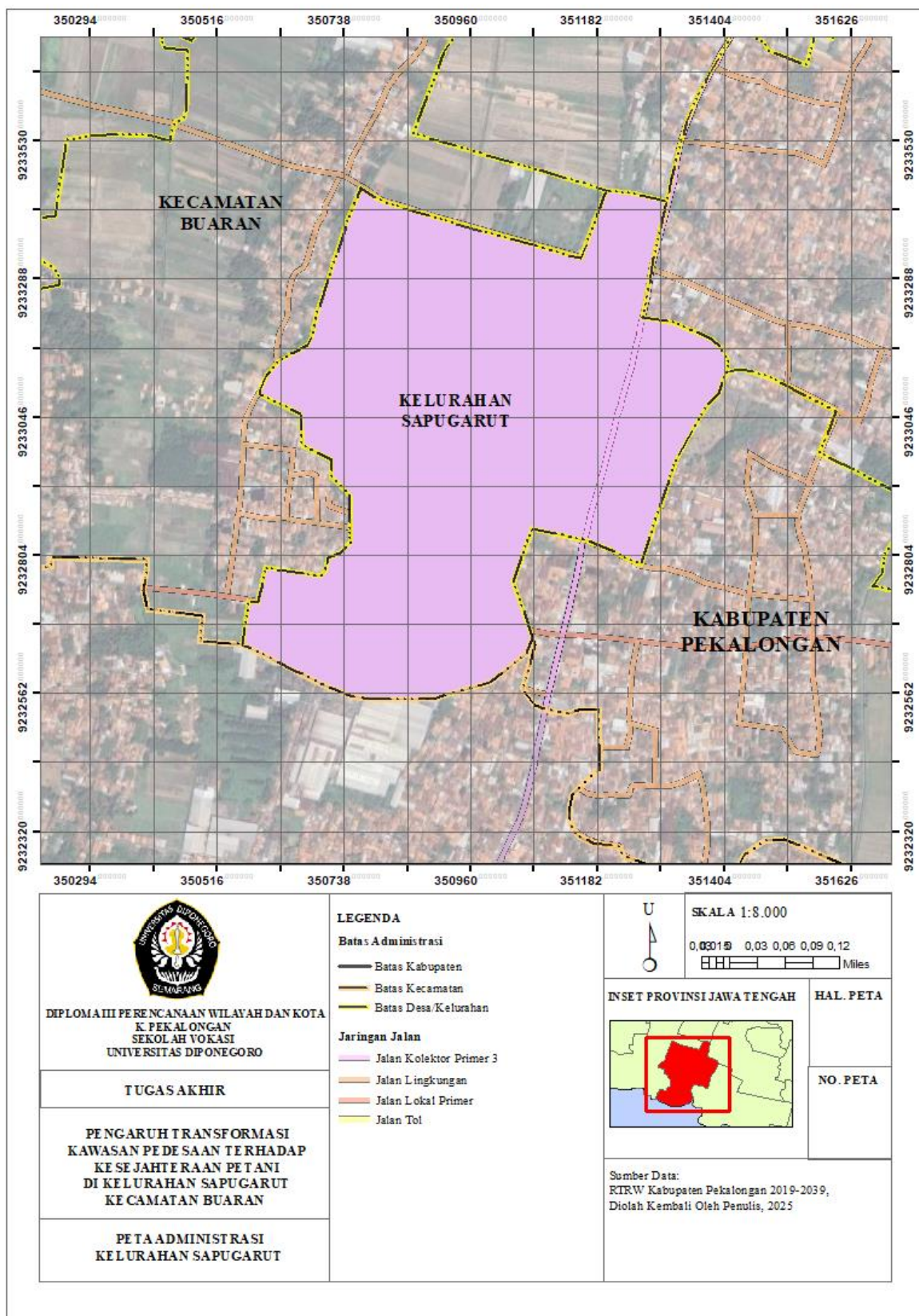
Kabupaten Pekalongan memiliki topografi yang didominasi oleh topografi rendah yaitu sekitar 76,84%, Adapun luas wilayah Kabupaten Pekalongan mencapai 836,15 km², dengan terdiri dari 19 Kecamatan dan 285 desa/kelurahan. Kabupaten Pekalongan pada tahun 2023 memiliki kepadatan penduduk yang mencapai 1.205 jiwa/km², dengan kecamatan tertinggi yaitu Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Wiradesa, Kecamatan Tirto dan Kecamatan Buaran yang dimana kepadatannya sudah mencapai lebih dari 4.000 jiwa/km². Kepadatan penduduk di Kecamatan Buaran menjadi yang tertinggi diantara kecamatan lain di Kabupaten Pekalongan, yaitu dengan kepadatan penduduk mencapai 5.077 jiwa/km². Kecamatan Buaran merupakan kecamatan yang strategis, karena berdekatan dengan Kota Pekalongan, dan didukung dengan akses terhadap fasilitas umum yang mudah dicapai oleh masyarakat.

Kecamatan Buaran memiliki luas wilayah yang mencapai 9,54 km² yang terdiri dari 3 kelurahan, 10 Desa/Kelurahan, 41 Dusun, 82 RW dan 237 RT. Desa/kelurahan di Kecamatan

Buaran diantaranya yaitu Desa Wonoyoso, Desa Coprayan, Desa Pakumbulan, Desa Watusalam, Desa Simbang Wetan, Desa Kertijayan, Desa Paweden, Kelurahan Simbang Kulon, Kelurahan Bligo, dan Kelurahan Sapugarut. Desa Watusalam merupakan desa terluas di Kecamatan Buaran dengan total luas mencapai 1,58 km², sedangkan Kelurahan Sapugarut merupakan kelurahan yang memiliki luas terkecil diantara desa/kelurahan lain di Kecamatan Buaran dengan luas yang hanya mencapai 0,46 km².

Kelurahan Sapugarut merupakan salah satu dari tiga kelurahan di Kecamatan Buaran yang termasuk dalam wilayah dengan cakupan yang kecil jika dibandingkan dengan desa/kelurahan lain. Kelurahan Sapugarut ini terbagi menjadi 5 RW, 15 RT, meskipun secara administratif Kelurahan Sapugarut ini kecil, akan tetapi kelurahan ini memiliki kepadatan penduduk yang mencapai 2.896 jiwa/km², yang mana menandakan bahwa terdapat tekanan pada ketersediaan ruangnya. Kelurahan Sapugarut ini lokasinya strategis, karena berada di tengah wilayah administratif Kecamatan Buaran, dengan jarak ke Ibukota Kecamatan yang hanya mencapai 0,6 Km, juga berdekatan dengan jalur utama, pusat perdagangan lokal, dan aktivitas ekonomi lain seperti industri, yang mana menjadikan kelurahan ini diminati oleh masyarakat karena mendukung dalam akses terhadap aktivitas ekonomi serta permukimannya.

Aktivitas ekonomi di Kelurahan Sapugarut ini tentunya berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat, karena dengan adanya akses yang baik terhadap aktivitas ekonomi, maka dapat membantu kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sapugarut, hal ini dibuktikan dengan mata pencaharian di Kelurahan Sapugarut yang didominasi oleh buruh pabrik, pedagang dan wiraswata. Kelurahan Sapugarut memiliki letak yang strategis. Kondisi tersebut tidak selalu memberikan dampak positif, akan tetapi juga dapat memberikan tantangan, terutama dalam pengelolaan ruang terbuka hijau dan lahan pertanian yang semakin menyempit. Berikut merupakan **Gambar 3.1** merupakan peta administrasi wilayah studi yaitu Kelurahan Sapugarut, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan.



Sumber: RTRW Kabupaten Pekalongan Tahun 2019-2039, Diolah Kembali Oleh Penulis, 2025

Gambar 3.1 Peta Administrasi Kelurahan Sapugarut

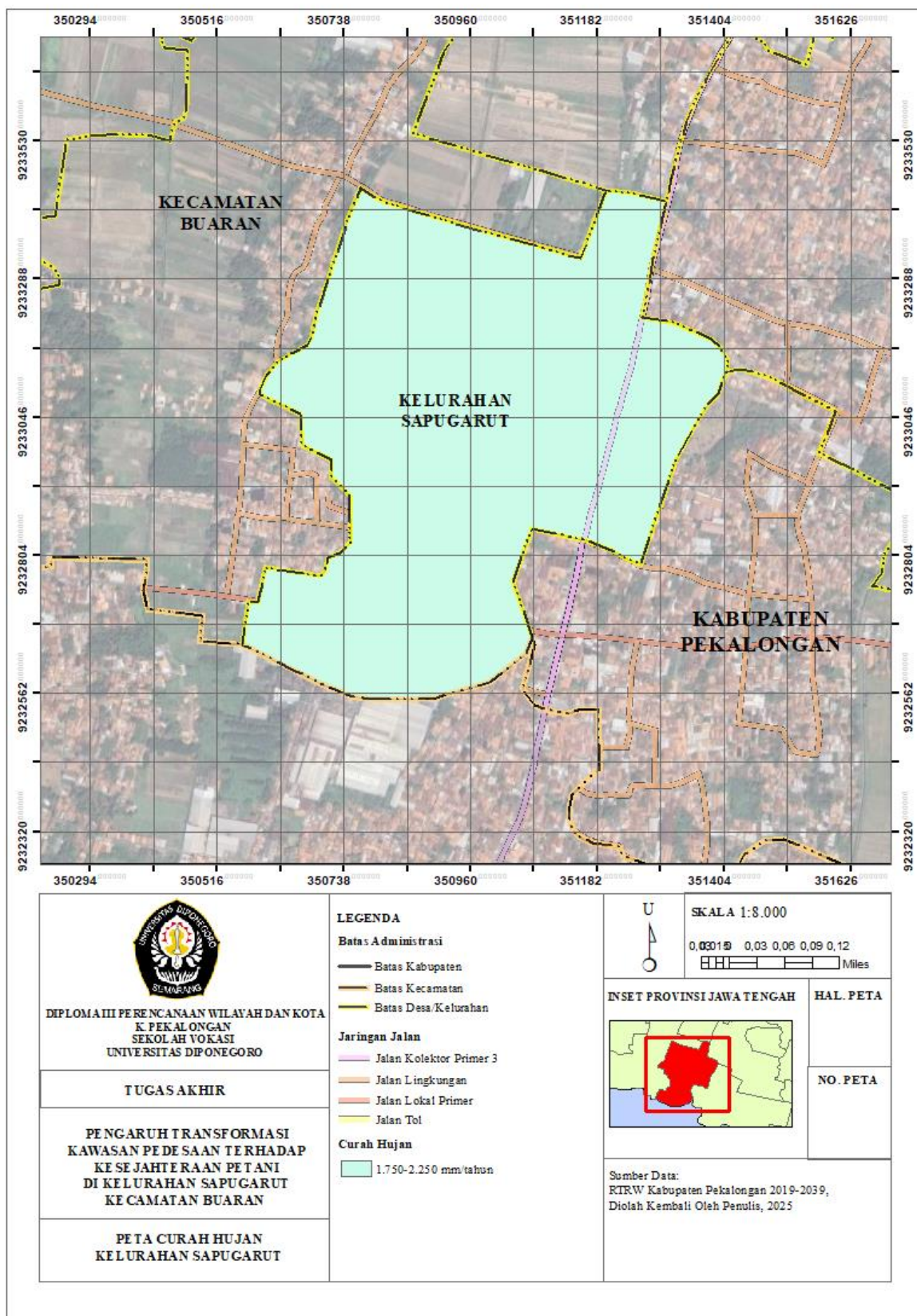
3.2 Kondisi Geografis dan Kondisi Fisik

3.2.1 Curah Hujan

Hujan merupakan bagian dari siklus air yang digunakan untuk menjaga keseimbangan air, curah hujan dapat diklasifikan berdasarkan pada intensitasnya, yang dimana terbagi menjadi hujan ringan, sedang, dan lebat, hal ini sesuai dengan kajian klimatologi. Pengukuran curah hujan ini umumnya dapat dilakukan dengan menggunakan alat pengukuran hujan atau alat penakar hujan yang digunakan untuk mencatat jumlah presipitasi hujan dalam satuan milimeter per satuan dalam waktu tertentu. Fenomena atmosfer global seperti *El Nino-Southern Oscillation* (ENSO), merupakan salah satu fenomena yang memiliki dampak yang signifikan terhadap variabilitas curah hujan di berbagai wilayah, sementara terdapat juga fenomena La Nina yang berpotensi untuk membantu meningkatkan intensitas curah hujan di suatu wilayah (Dwirani et al., 2019).

Curah hujan ini merupakan faktor utama dalam penentuan produktivitas tanaman pada sektor pertanian, terutama pada system pertanian tadah hujan, yang dimana intensitas curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan ketidakpastian dalam produksi pertanian, serta berpotensi untuk meningkatkan risiko gagal panen (Aditya et al., 2021). Intensitas curah hujan yang tidak merata atau tidak terdistribusi secara seimbang pada musim hujan dan musim kemarau, maka akan berdampak pada tanaman yang menjadi rentan mengalami kekeringan pada masa pertumbuhannya, hal ini akan menyebabkan kegagalan panen apabila petani tidak memiliki strategi adaptasi yang baik.

Intensitas curah hujan di Kelurahan Sapugarut mencapai 1750-2250 mm/tahun, yang dimana masuk dalam kategori rendah. Intensitas curah hujan rendah ini dapat dipengaruhi oleh topografi yang dimiliki Kelurahan Sapugarut, yang mana Kelurahan Sapugarut ini memiliki topografi yang rendah. Topografi rendah ini cenderung tidak memiliki mekanisme alami untuk mengatur limpasan air hujan secara efisien, yang dapat menyebabkan permasalahan seperti banjir, karena air hujan yang tidak meresap ke dalam tanah. Curah hujan ini dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat, termasuk pada sektor pertanian, sumber daya air, dan sebagainya. Berikut merupakan **Gambar 3.2** terkait peta curah hujan yang terdapat di Kelurahan Sapugarut.



Sumber: RTRW Kabupaten Pekalongan Tahun 2019-2039, Diolah Kembali Oleh Penulis, 2025

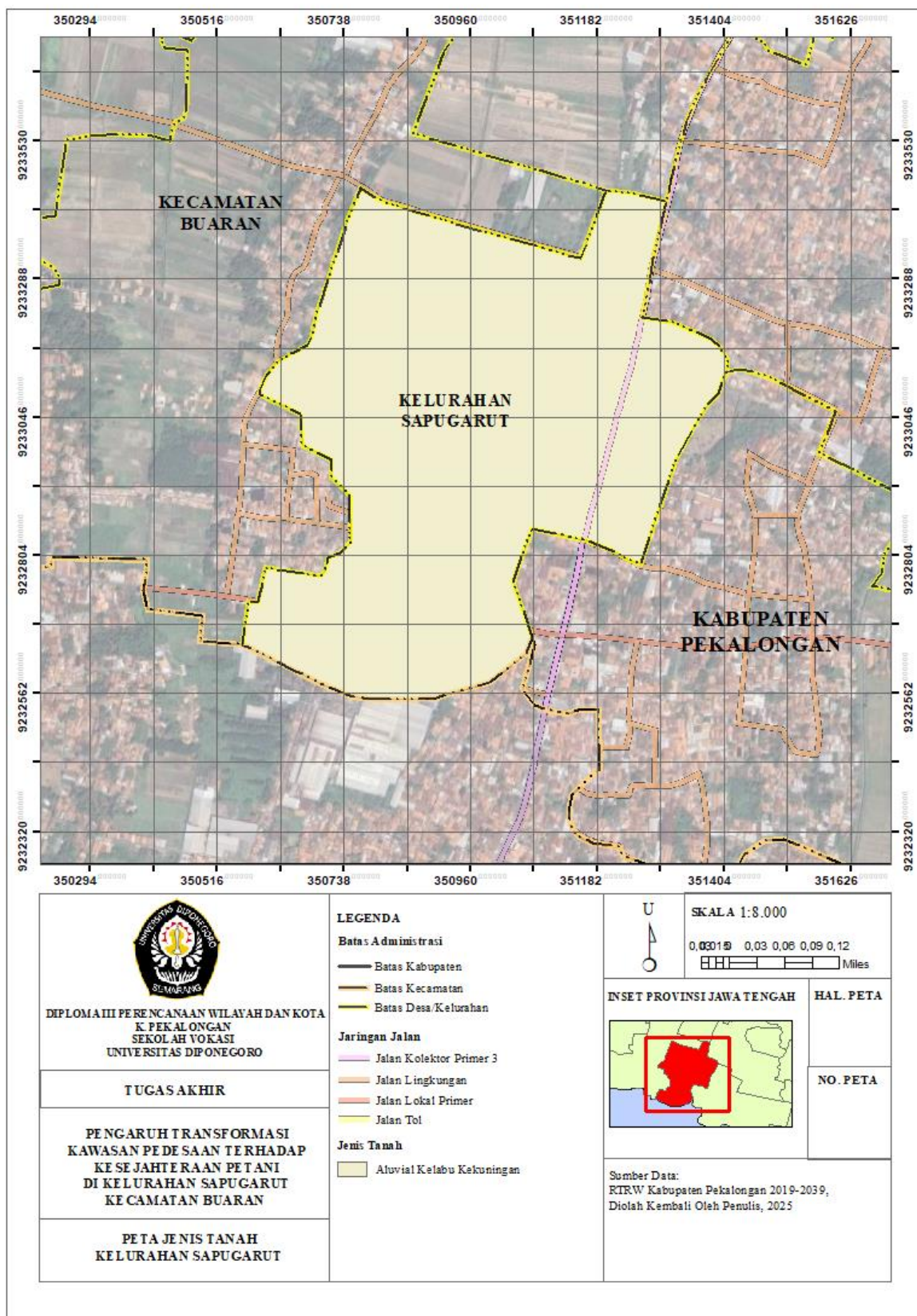
Gambar 3.2 Curah Hujan Kelurahan Sapugarut

3.2.2 Jenis Tanah

Tanah merupakan benda hidup yang terpeting bagi ekosistem daratan yang terbentuk melalui proses pelapukan batuan serta aktivitas organisme dalam jangka waktu yang panjang. Tanah ini memiliki lapisan yang dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan air, penyaringan berbagai zat yang terdapat di dalam lingkungan, serta dapat berfungsi sebagai media tumbuh tanaman. Tanah tentunya memiliki karakteristik yang biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi iklim, topografi, bahan induk, usia tanah, aktivitas biologi, dan sebagainya (Hakim, 2019). Tanah memiliki berbagai jenisnya, seperti yang sering dijumpai yaitu jenis tanah lempung yang dimana jenis tanah ini memiliki daya serap air yang tinggi serta partikelnya yang halus. Jenis tanah ini bersifat kohesif, sehingga sulit diolah dalam kondisi yang basah, serta jenis tanah ini memiliki pori-pori yang kecil, dan biasanya memiliki kondisi drainase yang buruk, sehingga sering tergenang air, akan tetapi jenis tanah ini mampu menyimpan unsur hara dengan baik.

Karakteristik pada jenis tanah lempung ini biasanya lebih cocok untuk ditanami jenis tanaman yang membutuhkan kelembapan yang tinggi, akan tetapi jenis tanah ini kurang cocok untuk ditanami oleh tanaman yang memerlukan aerasi akar yang baik (Hakim, 2019). Jenis tanah lain yaitu seperti jenis tanah berpasir, yang dimana jenis tanah berpasir ini memiliki ukuran partikel yang lebih besar dengan pori-pori yang lebih lebar. Jenis tanah ini memiliki daya serap yang rendah sehingga tanah pasir ini kurang mampu untuk mempertahankan kelembapan serta unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Jenis tanah berpasir ini umumnya ditemukan pada daerah pantai serta daerah gurun, jenis tanah berpasir ini akan lebih sesuai untuk tanaman yang tahan terhadap kondisi kering.

Karakteristik dari jenis tanah tentunya berbeda-beda, yang dimana karakteristik tersebut berpengaruh terhadap kemampuan tanah dalam menyimpan air, mendukung pertumbuhan tanaman, serta mengurangi dampak erosi (Hakim, 2019). Kelurahan Sapugarut memiliki jenis tanah berupa aluvial kelabu kekuningan yang dimana jenis tanah ini dapat membantu dalam sektor pertanian, berikut merupakan **Gambar 3.3** terkait jenis tanah di Kelurahan Sapugarut.



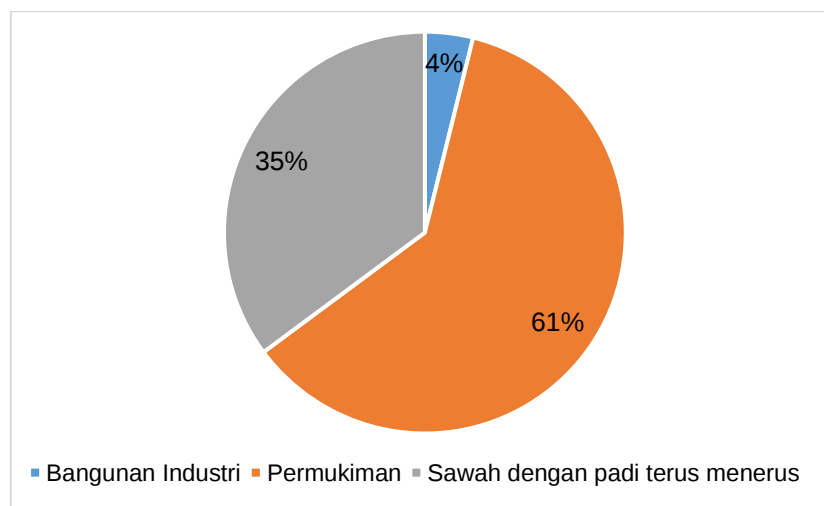
Sumber: RTRW Kabupaten Pekalongan Tahun 2019-2039, Diolah Kembali Oleh Penulis, 2025

Gambar 3.3 Jenis Tanah Kelurahan Sapugarut

3.2.3 Penggunaan Lahan

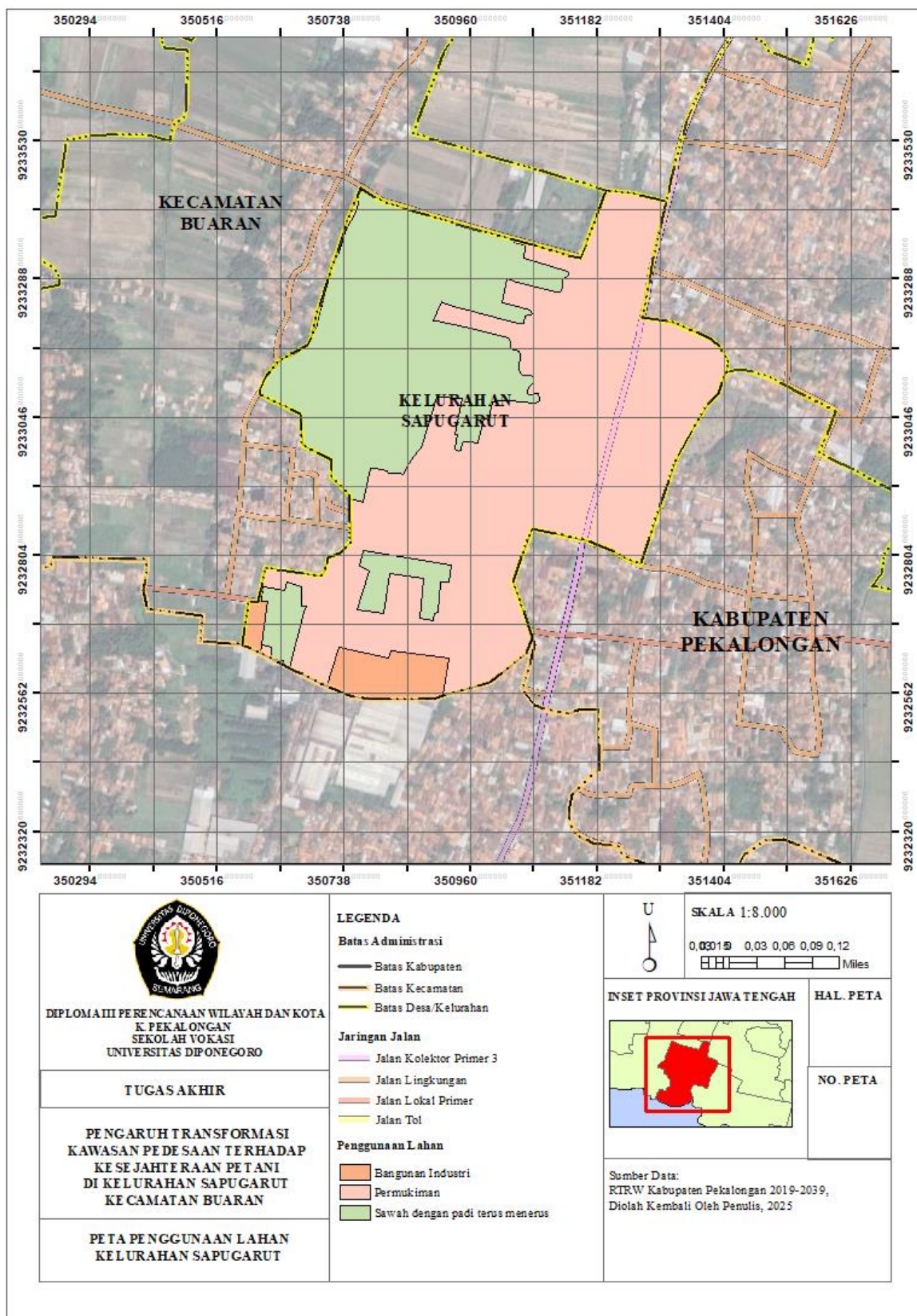
Penggunaan lahan merupakan hal terpenting bagi manusia, karena penggunaan lahan ini memiliki berbagai aktivitas seperti pertanian, perumahan, industri, konservasi, dan sebagainya. Penggunaan lahan tentunya harus dikelola dengan baik dan sesuai dengan peruntukannya, karena dengan pengelolaan yang baik, maka dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta dapat mengurangi risiko bencana seperti bencana banjir, longsor (Radhi, 2024). Penggunaan lahan tentunya akan mengalami perubahan, oleh karena itu diperlukannya analisis mendalam untuk memastikan bahwa perubahan penggunaan lahan tersebut tidak menyebabkan kerusakan lingkungan.

Penggunaan lahan di Kecamatan Buaran didominasi oleh lahan terbangun berupa permukiman, dengan total mencapai 444 Ha. Penggunaan lahan permukiman serta sawah dengan padi terus menerus menyebar di seluruh desa/kelurahan di Kecamatan Buaran. Kecamatan Buaran tentunya memiliki lahan yang diperuntukkan sebagai lahan industri yang dimana terletak pada 6 desa/kelurahan dengan total luas mencapai 19,51 Ha yang berada di Desa Coprayan, Desa Kertijayan, Desa Pakumbulan, Desa Simbang Wetan, Desa Watusalam, dan Kelurahan Sapugarut. Kelurahan Sapugarut merupakan kelurahan dengan luasan terkecil, akan tetapi lahan di kelurahan tersebut tidak hanya dimanfaatkan sebagai lahan permukiman saja, melainkan juga terdapat lahan saah dengan padi terus menerus serta bangunan industri yang sudah berdiri sejak lama di Kelurahan Sapugarut. **Gambar 3.4** berikut menunjukkan luasan penggunaan lahan di Kelurahan Sapugarut, serta **Gambar 3.5** terkait peta penggunaan lahan Kelurahan Sapugarut.



Sumber: RTRW Kabupaten Pekalongan Tahun 2019, Diolah Kembali Tahun 2025

Gambar 3.4 Luasan Penggunaan Lahan Kelurahan Sapugarut



Sumber: RTRW Kabupaten Pekalongan Tahun 2019-2039, Diolah Kembali Oleh Penulis, 2025

Gambar 3.5 Penggunaan Lahan Kelurahan Sapugarut

3.3 Kondisi Demografi dan Sosial Ekonomi

3.3.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk adalah total populasi yang tinggal di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. Faktor ini memberikan gambaran umum tentang skala demografis dan menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Berdasarkan sensus penduduk, jumlah penduduk dapat diklasifikasikan lebih lanjut berdasarkan gender, yang umumnya terbagi menjadi laki-laki dan perempuan. Perbedaan gender dalam populasi penduduk dapat mempengaruhi dinamika sosial dan ekonomi suatu wilayah, misalnya dalam hal ketersediaan tenaga kerja dan kebutuhan layanan kesehatan yang spesifik gender. Perbedaan gender dalam kependudukan juga dapat diartikan sebagai sex ratio.

Jumlah penduduk tentunya akan terus meningkat, hal ini tentunya berdampak pada semua aspek seperti aspek ekonomi, aspek sosial, dan sebagainya. Peningkatan jumlah penduduk atau laju pertumbuhan penduduk dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti angka kelahiran, angka kematian, urbanisasi, dan sebagainya. Jumlah penduduk di Kecamatan Buaran pada tahun 2024 yaitu mencapai 48.436 jiwa. Jumlah penduduk di Kecamatan Buaran didominasi oleh penduduk laki-laki yang mencapai 24.609 jiwa. Penduduk di Kecamatan Buaran tersebar di 10 desa/kelurahan dengan penduduk terbanyak berada di Desa Kertijayan, yang dimana jumlah penduduknya mencapai 5.917 jiwa, sedangkan desa/kelurahan dengan penduduk sedikit yaitu berada di Kelurahan Sapugarut, yang dimana hanya mencapai 3.215 jiwa. Jumlah penduduk secara time series akan ditampilkan pada **Tabel III.1**.

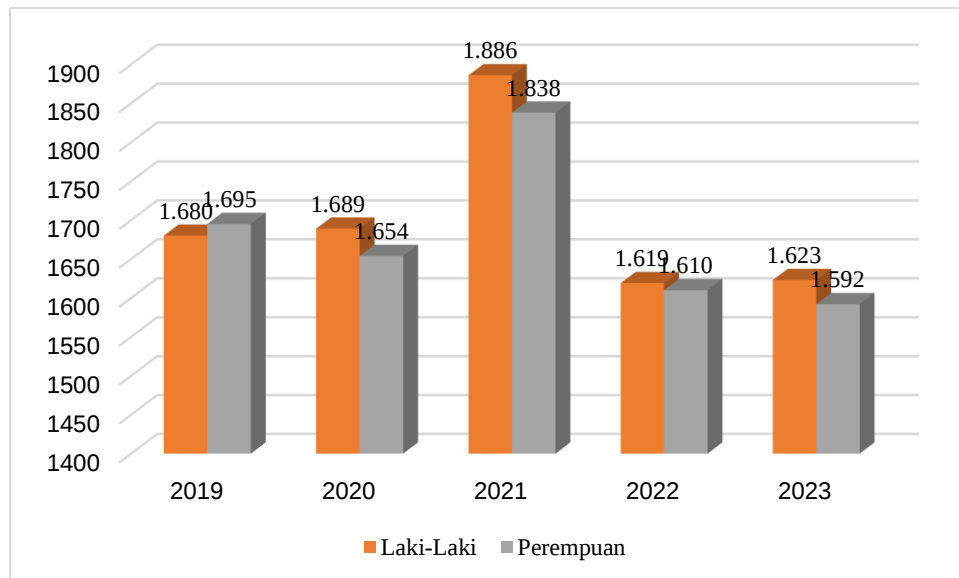
Tabel III.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Buaran, Tahun 2019-2023

Desa	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Coprayan	3.916	4.531	3.223	4.578	4.670
Sapugarut	3.375	3.343	3.724	3.229	3.215
Wonoyoso	4.436	4.481	7.716	4.686	4.724
Bligo	4.121	3.567	4.447	3.777	3.776
Pakumbulan	4.117	4.580	4.650	4.683	4.846
Watusalam	4.199	4.561	4.518	4.443	4.529
Simbang Wetan	4.805	4.580	4.348	4.828	4.831
Simbang Kulon	8.844	7.773	4.721	7.779	7.831
Kertijayan	6.339	5.746	5.707	5.859	5.917
Paweden	3.313	3.860	3.836	3.974	4.097
Total	47.465	47.022	47.022	47.836	48.436

Sumber: Kecamatan Buaran Dalam Angka, 2019-2023

Kelurahan Sapugarut merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Buaran yang memiliki jumlah penduduk pada tahun 2023 mencapai 3.215 jiwa yang tersebar pada 5 RW, 15 RT. Jumlah penduduk di Kelurahan Sapugarut ini setiap tahunnya mengalami penurunan,

hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, salah satunya yaitu diakibatkan oleh tingkat kelahiran dan tingkat kemarian yang terjadi di Kelurahan Sapugarut. Data terkait sex ratio di Kelurahan Sapugarut pada tahun 2023 dapat dilihat pada **Gambar 3.6**.



Sumber: Kecamatan Buaran Dalam Angka, 2019-2023

Gambar 3.6 Jumlah Penduduk Kelurahan Sapugarut

3.3.2 Kepadatan Penduduk

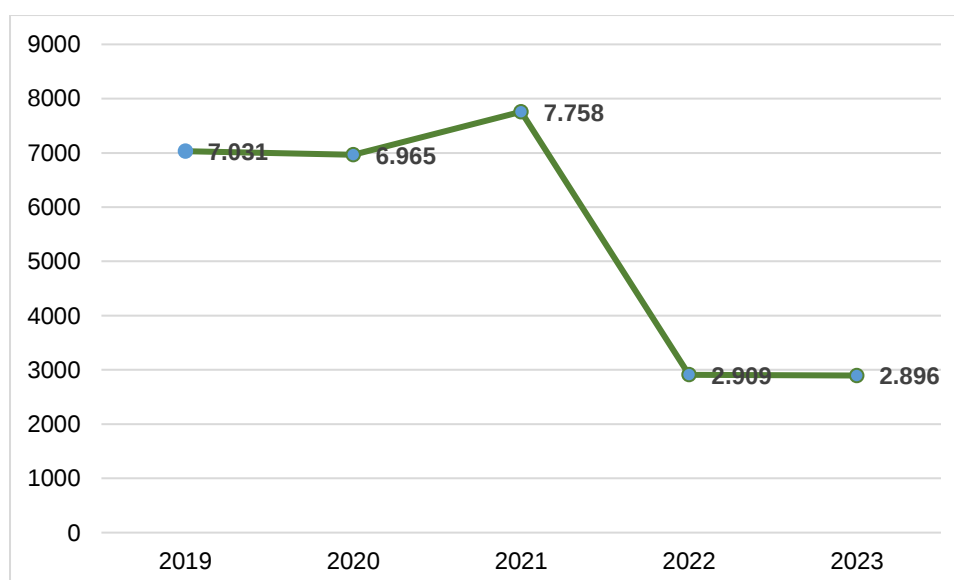
Kepadatan penduduk, yang dihitung dengan membagi jumlah penduduk dengan luas wilayah menunjukkan distribusi populasi di suatu wilayah. Wilayah dengan kepadatan tinggi cenderung menghadapi tantangan seperti kemacetan, keterbatasan sumber daya, dan masalah lingkungan, sebaliknya, wilayah dengan kepadatan rendah mungkin memiliki akses lebih baik terhadap ruang dan sumber daya, namun bisa menghadapi masalah dalam penyediaan infrastruktur dan layanan (Latue et al., 2023). Kepadatan penduduk dapat dihitung dengan menghitung jumlah penduduk dengan luas wilayahnya, adapun kepadatan penduduk ini juga terjadi di Kecamatan Buaran, yang dimana banyak penduduk yang berpindah ke Kecamatan Buaran. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti banyaknya penduduk yang berpindah karena bencana banjir rob yang terjadi di Kota Pekalongan, serta lokasi dari Kecamatan Buaran yang strategis dikarenakan banyaknya industri di Kecamatan Buaran, sehingga hal tersebut mampu membantu perekonomian penduduk di Kecamatan Buaran. Kepadatan penduduk di Kecamatan Buaran dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada **Tabel III.2**.

Tabel III.2 Kepadatan Penduduk Kecamatan Buaran Tahun 2019-2023

Desa	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²) Tahun 2019-2023				
	2019	2020	2021	2022	2023
Coprayan	3.527	4.082	2.904	7.043	7.185
Sapugarut	7.031	6.965	7.758	2.909	2.896
Wonoyoso	6.931	7.002	12.056	3.873	3.904
Bligo	6.340	5.488	6.842	7.869	7.867
Pakumbulan	3.402	3.785	3.843	2.964	3.067
Watusalam	2.657	2.887	2.859	6.439	6.564
Simbang Wetan	6.963	6.638	6.301	3.990	3.993
Simbang Kulon	7.309	6.424	3.902	12.155	12.236
Kertijayan	6.965	6.314	6.271	6.438	6.502
Paweden	3.125	3.642	3.619	3.749	3.865
Total	54.250	53.227	56.355	57.429	58.079

Sumber: Kecamatan Buaran Dalam Angka, 2019-2023

Kepadatan penduduk di Kecamatan Buaran meningkat setiap tahunnya, hingga pada tahun 2023 kepadatan penduduk di Kecamatan Buaran mencapai 58.079 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Buaran terdapat pada Desa Simbang Kulon, dengan total kepadatan mencapai 12.236 jiwa/km², adapun kepadatan penduduk dengan total terkecil yaitu berada di Kelurahan Sapugarut. Kelurahan Sapugarut ini merupakan kelurahan dengan jumlah dan total luas yang paling sedikit jika dibandingkan dengan desa/kelurahan lain di Kecamatan Buaran. Kepadatan penduduk di Kelurahan Sapugarut dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada **Gambar 3.7**.



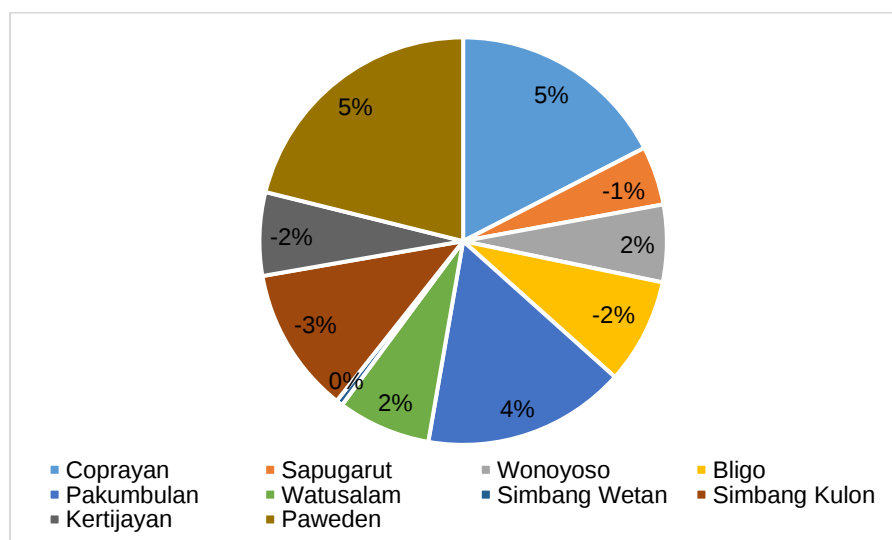
Sumber: Kecamatan Buaran Dalam Angka, 2019-2023

Gambar 3.7 Kepadatan Penduduk Kelurahan Sapugarut

3.3.3 Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merujuk pada perubahan jumlah populasi seiring waktu, yang dapat diukur melalui perubahan dalam jumlah individu. Penelitian Nelson dan Leibstein yang dikutip dari (Nadia Cavina Putri, 2021) menyatakan bahwa terdapat hubungan langsung antara peningkatan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Laju pertumbuhan yang cepat di negara berkembang sering kali tidak diiringi dengan perbaikan kesejahteraan yang signifikan, dan dalam jangka panjang, dapat menyebabkan penurunan kesejahteraan serta peningkatan jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan.

Peningkatan jumlah penduduk miskin ini dapat berpotensi untuk meningkatkan angka kriminalitas, dengan melakukan segala cara untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pertumbuhan penduduk dari tahun 2019-2023 di Kecamatan Buaran sendiri berada dalam presentase 18%, yang dimana pertumbuhan penduduk paling tinggi hanya mencapai persentase sebesar 5% yang hanya terdapat pada 2 desa, beberapa desa lain tidak mengalami pertumbuhan penduduk bahkan dapat dikatakan mengalami penurunan pertumbuhan penduduk. **Gambar 3.8** yang merupakan persentase pertumbuhan penduduk di Kecamatan Buaran dari tahun 2019-2023.



Sumber: Kecamatan Buaran Dalam Angka, 2019-2023, Diolah Kembali, Tahun 2025

Gambar 3.8 Persentase Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Buaran Tahun 2019-2023

Gambar 3.8 di atas menunjukkan terkait persentase pertumbuhan penduduk di Kecamatan Buaran berdasarkan 10 desa di dalamnya, yang dimana persentase dari masing-masing desa di Kecamatan Buaran mengalami pertumbuhan penduduk yang berbeda. Desa Coprayan dan Desa Paweden merupakan desa dengan pertumbuhan penduduk yang positif, sedangkan Desa Simbang Wetan yang tidak mengalami perubahan penduduk sama sekali. Desa Simbang Kulon dengan pertumbuhan penduduk yang negative atau dapat dikatakan bahwa Desa Simbang Kulon dan beberapa desa lain dengan persentase negative mengalami penurunan populasi.

Penurunan populasi dan kenaikan populasi ini menunjukkan bahwa perkembangan penduduk di desa/kelurahan cukup variative, hal ini dapat difaktori oleh beberapa hal seperti urbanisasi, tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan sebagainya. Desa/kelurahan yang mengalami penurunan populasi paling sedikit diantara desa/kelurahan lainnya yaitu Kelurahan Sapugarut, dengan penurunan populasi yang hanya mencapai -1%, hal ini juga tentunya disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu perpindahan penduduk. Tercatat di data Kelurahan Sapugarut pada bulan November, bahwa terdapat 5 penduduk yang melakukan urbanisasi atau perpindahan hunian, sedangkan jumlah penduduk yang datang ke Kelurahan Sapugarut hanya mencapai 2 penduduk saja. Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor penting dalam mempengaruhi perpindahan penduduk di suatu desa/kelurahan.

3.3.4 Penduduk Menurut Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Indonesia sangatlah beragam, hal ini dapat dipengaruhi oleh sosial, dan ekonomi yang berbeda pada setiap daerah. Distribusi terkait mata pencaharian menjadi penting, karena hal ini dapat berguna bagi perencanaan pembangunan yang tepat sasaran. Pencaharian penduduk mengacu pada pekerjaan atau profesi yang dilakukan oleh penduduk dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mereka. Penduduk dapat dikelompokkan ke dalam berbagai sektor ekonomi, seperti pertanian, industri, jasa, dan perdagangan. Data tentang pencaharian ini memberikan gambaran tentang karakteristik ekonomi suatu wilayah dan distribusi penduduk dalam berbagai sektor ekonomi.

Klasifikasi pencaharian sangat penting dalam merencanakan pembangunan ekonomi, karena dapat menunjukkan sektor mana yang mendominasi dan mana yang memerlukan peningkatan. Misalnya, daerah yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian mungkin memerlukan program pengembangan teknologi pertanian atau diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tersebut. Wilayah dengan dominasi sektor jasa atau industri mungkin memerlukan kebijakan terkait tenaga kerja dan pendidikan yang lebih spesifik untuk mendukung kebutuhan sektor tersebut (Puji Hardati, 2014). **Tabel III.3** ini berisi jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian di Kecamatan Buaran.

Tabel III.3 Penduduk Menurut Pekerjaan Kecamatan Buaran, Tahun 2016

Desa/Kelurahan	Jenis Pekerjaan					
	Pertanian	Pertambangan	Industri	Konstruksi	Perdagangan	Restoran
Coprayan	70	0	1,126	96	261	58
Sapugarut	13	0	801	31	394	77
Wonayoso	32	0	1,591	26	367	99
Bligo	12	0	1,216	41	336	97
Pakumbulan	232	3	1,513	36	210	49
Watusalam	72	12	1245	114	281	57

Desa/Kelurahan	Jenis Pekerjaan					
	Pertanian	Pertambangan	Industri	Konstruksi	Perdagangan	Restoran
Simbang Wetan	15	0	1,448	56	386	63
Simbang Kulon	37	2	2657	47	628	121
Kertijayan	36	0	1902	61	555	92
Paweden	95	4	1,075	57	191	18
Jumlah	614	24	14,472	566	3,609	731

Sumber: Kecamatan Buaran Dalam Angka, Tahun 2017

Berdasarkan **Tabel 3.3** dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang bekerja di Kecamatan Buaran pada tahun 2016 didominasi oleh penduduk yang bekerja pada sektor industri, hal ini terjadi karena banyaknya industri besar maupun home industri yang bermunculan di Kecamatan Buaran, industri tersebut mayoritas merupakan industri batik yang dimana Kabupaten Pekalongan terkhusus Kecamatan Buaran merupakan wilayah penghasil batik. Jenis pekerjaan lainnya yang diambil oleh masyarakat di Kecamatan Buaran yaitu perdagangan, hal ini juga tidak lepas dari batik, yang dimana banyak ruko yang menjual batik di Kecamatan Buaran seperti di Desa Kertijayan, jenis pekerjaan pada sektor perdagangan lainnya juga dapat berupa perdagangan makanan, toko kelontong, dan sebagainya. Pekerjaan pada sektor pertanian di Kecamatan Buaran hanya mencapai 614 petani.

Jumlah petani di Kelurahan Sapugarut berdasarkan tabel dinyatakan bahwa terdapat 13 petani di tahun 2016, akan tetapi jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi, sehingga jumlah petani pun akan berkurang seiring dengan berjalannya waktu, yang dimana berdasarkan data dari Badan Penyuluhan Pertanian jumlah petani di Kelurahan Sapugarut saat ini hanya mencapai 9 petani saja. Pengurangan tersebut tentunya disebabkan oleh beberapa hal, seperti luas lahan pertanian yang semakin berkurang, banyak petani yang memilih untuk bekerja pada sektor lain, dan sebagainya.

3.3.4 Perekonomian Kabupaten Pekalongan

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pekalongan menurut Lapangan Usaha menunjukkan kinerja yang positif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan mencatat pertumbuhan ekonomi yang stabil sepanjang tahun. Peningkatan ini mencerminkan aktivitas ekonomi yang berkembang di berbagai sektor, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar dalam struktur PDRB Kabupaten Pekalongan, dengan kontribusi sebesar 30,15% pada tahun 2023. Dominasi sektor industri pengolahan ini menunjukkan peran penting industri pengolahan dalam perekonomian daerah, mencerminkan aktivitas manufaktur yang signifikan, selain itu sektor perdagangan besar dan eceran, konstruksi, serta pertanian juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB yang dimana nilai PDRB pada sektor pertanian ini

mencapai 4,50 triliun rupiah. Pertumbuhan di sektor-sektor ini mencerminkan diversifikasi ekonomi Kabupaten Pekalongan, yang tidak hanya bergantung pada satu sektor saja. Diversifikasi ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan peluang kerja bagi Masyarakat (Statistik, 2024)

Peningkatan PDRB per-kapita ini dapat mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pekalongan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berhasil meningkatkan pendapatan rata-rata penduduk, yang dimana hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup dan daya beli masyarakat di Kabupaten Pekalongan. Kinerja PDRB Kabupaten Pekalongan tahun 2023 menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dominasi sektor industri pengolahan, didukung oleh kontribusi sektor lainnya, mencerminkan struktur ekonomi yang kuat dan beragam. Peningkatan PDRB per kapita juga menunjukkan distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di masyarakat. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada **Tabel III.4**.

**Tabel III.4 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pekalongan
Tahun 2019-2023**

Lapangan Usaha	Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Agriculture, Forestry, and Fishing	16,48	17,01	16,85	16,20	15,99
Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	4,37	4,34	4,25	3,92	3,81
Industri Pengolahan/Manufacturing	31,07	30,75	30,96	30,77	30,15
Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	0,14	0,15	0,14	0,14	0,14
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03
Konstruksi/Construction	6,96	6,78	7,14	7,34	7,78
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	13,50	13,42	13,63	13,77	13,80
Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	2,43	1,98	1,96	2,98	3,18
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Accommodation and Food Service Activities	5,31	5,25	5,34	5,68	5,94

Lapangan Usaha	Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku				
	2019	2020	2021	2022	2023
Informasi dan Komunikasi Information and Communication	2,22	2,58	2,56	2,43	2,47
Jasa Keuangan dan Asuransi Financial and Insurance Activities	2,47	2,49	2,52	2,47	2,43
Real Estat/Real Estate Activities	1,33	1,35	1,31	1,26	1,26
Jasa Perusahaan/Business Activities	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Sosial Security	3,14	3,17	2,91	2,81	2,77
Jasa Pendidikan/Education	6,65	6,62	6,43	6,22	6,24
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Human Health and Sosial Work Activities	1,40	1,60	1,54	1,49	1,51
Jasa Lainnya/Other Services Activities	2,16	2,15	2,08	2,15	2,18
Produk Domestik Regional Bruto Gross Regional Domestic Product	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

3.4 Kebijakan

3.4.1 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan

Dokumen (PERDA, 2020) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pekalongan merupakan rencana yang berkaitan dengan penataan ruang, dimana berisi terkait arahan, strategi, dan kebijaksanaan umum terkait pengaturan dan pengendalian dalam kurun waktu 20 tahun. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pekalongan ini disusun untuk menjaga keterpaduan dan kesinambungan antar sektor pembangunan sebagai pengendalian program pembangunan Daerah dalam jangka panjang. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pekalongan ini dijadikan sebagai wadah untuk membantu mengkoordinasikan kegiatan pembangunan di Kabupaten Pekalongan, sehingga rencana ini wajib ditaati oleh semua pihak, baik pemerintah, swasta/pengusaha maupun masyarakat. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam RTRW ini akan dihadapkan pada sanksi sesuai UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Perencanaan suatu wilayah tentunya mengupayakan perencanaan yang baik dan jelas, oleh karena itu pada Bab II pasal 2 ayat (2) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disusun dengan lingkup materi RTRW Daerah yang meliputi tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan Kawasan

strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang. Pasal 2 disebutkan bahwa rencana struktur ruang system perkotaan. Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa Kesatuan wilayah yang terpadu dan berkelanjutan merupakan upaya terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi dalam strategi pembangunan yang menjamin keutuhan lingkungan hidup serta mutu hidup generasi saat ini hingga generasi masa depan di Daerah.

Tujuan penataan ruang ini didasari oleh 2 sektor utama, yaitu sektor industri dan pertanian, yang didukung oleh sektor perdagangan dan jasa. Sektor industri dan sektor pertanian merupakan sektor penting di Kabupaten Pekalongan, karena kedua sektor tersebut dapat membantu mendorong pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Pekalongan, serta dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk di Kabupaten Pekalongan, akan tetapi kedua sektor ini tetap didukung dengan sektor lain, seperti sektor perdagangan jasa, dan sebagainya. Paragraf 5 pasal 55 ayat (1) terkait Kawasan Peruntukan Industri menyebutkan bahwa pengembangan Kawasan industri berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri yang akan diterapkan oleh pemerintah pusat. Pada ayat (2) disebutkan terkait rencana Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 huruf e dengan luas kurang lebih 1.533 hektar yang berada di 14 kecamatan.

Kecamatan yang masuk dalam rencana tersebut salah satunya yaitu Kecamatan Buaran, yang sektor industri di kecamatan ini didukung dengan sektor pariwisata, sebagaimana disebutkan dalam paragraph 6 pasal 56 ayat (4) huruf (i) yaitu Sentra Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) Pakumbulan di Kecamatan Buaran. Pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sektor utama di Kabupaten Pekalongan terdapat pada sektor industri dan pertanian yang didukung oleh sektor lain, seperti sektor pariwisata dan sebagainya, salah satunya berada di Kecamatan Buaran yang mengoptimalkan peningkatan perekonomian dari kedua sektor tersebut.

Kecamatan Buaran tidak hanya direncanakan sebagai Kawasan peruntukan industri saja, akan tetapi juga diperuntukkan sebagai Kawasan permukiman, hal ini sesuai dengan Paragraf 7 pasal 57 ayat (2) yaitu Kecamatan Buaran yang masuk ke dalam kawasan permukiman perkotaan. Kecamatan Buaran memiliki lokasi yang strategis, hal ini dibuktikan dalam paragraph 3 pasal 63 ayat (3) yang dimana Kecamatan Buaran masuk ke dalam kawasan perbatasan yaitu Kawasan perbatasan Buaran - Kota Pekalongan. Berdasarkan paragraf 2 pasal 50 pasal (1) menyebutkan bahwa Kawasan pertanian meliputi Kawasan tanaman pangan, Kawasan hortikultura, dan penetapan Kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Pasal (2) menyebutkan bahwa terdapat luas Kawasan tanaman pangan kurang lebih 23.404 hektar, dengan Kecamatan Buaran salah satunya, juga pada pasal (3) yang menyebutkan bahwa Kecamatan Buaran menjadi salah satu kecamatan yang diperuntukkan sebagai Kawasan pertanian hortikultura.

3.4.2 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2009

Lahan pertanian berdasarkan (Republik Indonesia, 2009.) pasal 1 merupakan bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian. Lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan lahan penting dalam sektor pertanian yang dimana lahan pertanian ini ditetapkan untuk dikembangkan serta dilindungi agar dapat menghasilkan pangan nasional secara konsisten. Cadangan pada lahan pertanian pangan berkelanjutan lebih potensial untuk dilindungi dalam pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaan pangan tetap terkendali dan bermanfaat bagi lahan pertanian pangan berkelanjutan di masa depan. Lahan pertanian pangan berkelanjutan dimanfaatkan untuk menjamin konservasi tanah dan air dalam pemanfaatannya, hal ini sesuai dengan pasal 33 ayat 1.

Lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan pasal 37 yang dimana menyebutkan bahwa pengendalian terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui intensif, disinsentif, mekanisme perizinan proteksi, serta penyuluhan. Intensif yang dimaksudkan pada pasal 37 dijabarkan pada bagian kedua pasal 38 yang dapat berupa keringanan pajak bumi dan bangunan, pengembangan infrastruktur pertanian, pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul, kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi, dan sebagainya. Pemberian intensif ini dapat diberikan dengan mempertimbangkan beberapa aspek sesuai dengan pasal 40, seperti jenis lahan pertanian pangan berkelanjutan, kesuburan tanah, luas tanam, dan sebagainya. Disinsentif yang akan diterima oleh petani pada pasal 42 berupa pencabutan insentif terhadap petani yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan pasal 34, seperti point (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas tanah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan berwajibkan memanfaatkan tanah sesuai peruntukan, serta mencegah kerusakan irigasi.

3.5 Identifikasi Kondisi Pertanian

3.5.1 Kondisi Lahan Pertanian

Kecamatan Buaran merupakan salah satu kecamatan yang tidak hanya diperuntukkan sebagai permukiman juga industri, akan tetapi juga terdapat lahan pertanian yang membantu sumber pangan serta perekonomian di Kecamatan Buaran. Kecamatan Buaran berdasarkan RTRW Kabupaten Pekalongan memiliki jumlah luas lahan pertanian yaitu sebesar 426.88 Ha. Lahan sawah ini merupakan lahan sawah dengan padi terus menerus, akan tetapi lahan sawah saat ini terus berkurang hingga pada tahun 2022-2023 lahan sawah di Kecamatan Buaran hanya mencapai 315.24 Ha. Jumlah lahan sawah di Kecamatan Buaran akan disajikan secara time series dari tahun 2020 hingga tahun 2023, jumlah lahan sawah dapat dilihat pada **Tabel III.5**, berikut juga disajikan **Gambar 3.9** terkait kondisi lahan pertanian produktif dan tidak produktif yang terdapat di Kelurahan Sapugarut pada tahun 2024.



Sumber: Observasi Lapangan, Tahun 2025

Gambar 3.9 Kondisi Lahan Pertanian Produktif dan Non Produktif di Kelurahan Sapugarut

Tabel III.5 Kondisi Lahan Pertanian Kecamatan Buaran

Desa	Lahan Sawah Produktif (Ha)			Komoditas	Sawah Tidak Ditanami (Ha)	Total Luas Lahan
	2020	2021	2022-2023		2022-2023	2022-2023
Coprayan	42,9	42,9	41,9	Padi	1,00	42,90
Sapugarut	6,87	5,87	4,87		2,00	6,87
Wonoyoso	31,71	31,71	31,71		0,00	31,71
Bligo	27,94	27,94	27,94		0,00	27,94
Pakumbulan	44,56	42,56	41,56		3,00	44,56
Watusalam	36,77	36,77	36,77		0,00	36,77
Simbang Wetan	22,54	22,54	22,54		0,00	22,54
Simbang Kuon	27,45	27,45	27,45		0,00	27,45
Kertijayan	44,37	44,37	43,37		1,00	44,37
Paweden	40,14	37,14	37,14		3,00	40,14
Total	325,25	319,25	315,25		10,00	325,25

Sumber: Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Buaran, Tahun 2025

Jumlah luas lahan di Kecamatan Buaran terus berkurang hingga pada tahun 2023, jumlah luas lahan pertanian hanya mencapai 315.25 Ha. Berkurangnya lahan pertanian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi maupun faktor sosial. Luas lahan pertanian di Kecamatan Buaran terkecil yaitu berada di Kelurahan Sapugarut, hal ini dikarenakan luas di Kelurahan Sapugarut yang tergolong kecil, sehingga lahan pertaniannya juga semakin mengecil. Adapun faktor lain yang mempengaruhi berkurangnya lahan pertanian di Kelurahan Sapugarut yaitu berkaitan dengan banyaknya lahan sawah yang berubah fungsi menjadi Kawasan permukiman, juga industri kecil. Berkurangnya lahan pertanian di Kelurahan Sapugarut ini dapat mengancam ketahanan pangan lokal, serta dapat

memberikan risiko berupa bencana banjir akibat dari lebih banyaknya lahan terbangun dibanding dengan lahan hijau yang mampu menyerap air.

Lahan tidak produktif di Kelurahan Sapugarut mencapai sekitar 2 Ha, yang dimana merupakan asset lahan pertanian yang berada di bawah kewenangan pemerintah setempat untuk dapat dikelola oleh masyarakat di Kelurahan Sapugarut, baik dikelola sebagai lahan produksi pangan, konservasi lingkungan, maupun pemanfaatan lainnya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Kelurahan Sapugarut. Lahan tidak produktif tersebut tidak semuanya dibiarkan saja, akan tetapi terdapat beberapa lahan yang dimanfaatkan penggarap lahan untuk di tanami tanaman seperti kangkong, sementara beberapa lahan lainnya hanya dibiarkan menjadi lahan kosong saja. Hal ini dapat terjadi karena lahan tersebut merupakan asset pemerintah, yang dimana dalam pemanfaatannya harus melalui beberapa prosedur perizinan resmi.

Penggarap lahan dalam hal ini harus mengajukan perizinan pemanfaatan terlebih dahulu kepada pemerintah Kabupaten Pekalongan, untuk memastikan bahwa lahan tersebut dimanfaatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta hal ini juga dilakukan guna menjaga fungsi dan keberlanjutan lahan pertanian yang berfungsi untuk menjaga ketahanan pangan di Kelurahan Sapugarut. Lahan di Kelurahan Sapugarut yang sama sekali tidak digarap biasanya dikarenakan beberapa masyarakat atau penggarap yang tidak ingin mengajukan izin pemanfaatan lahan, oleh karena itu beberapa lahan di Kelurahan Sapugarut hanya dibiarkan saja menjadi lahan kosong tanpa ditanami oleh masyarakat setempat. Lahan produktif di Kelurahan Sapugarut pada tahun 2023 mencapai 4.87 Ha, yang dimana lahan tersebut dimanfaatkan oleh petani di Kelurahan Sapugarut dan sekitarnya untuk ditanami tanaman pangan berupa padi, yang mana hal ini didapatkan dari hasil kuesioner dimana 9 petani di Kelurahan Sapugarut menjawab padi merupakan komoditas yang ditanam pada lahan yang digarap, adapun terkait jenis lahan pertanian di Kelurahan Sapugarut yaitu tadah hujan yang mana hal ini sesuai dengan hasil kuesioner yang telah didapatkan dimana sebanyak 9 petani di Kelurahan Sapugarut menjawab Tadah Hujan sebagai sumber pengairan lahan pertaniannya, **Tabel III.6** merupakan tabel kondisi lahan pertanian terkait komoditas dan jenis lahan pertanian yang terdapat di Kelurahan Sapugarut.

Tabel III.6 Kondisi Lahan Pertanian Kelurahan Sapugarut

Kode Responden	Komoditas	Jenis Lahan Pertanian
P01	Padi	Tadah Hujan
P02	Padi	Tadah Hujan
P03	Padi	Tadah Hujan

Kode Responden	Komoditas	Jenis Lahan Pertanian
P04	Padi	Tadah Hujan
P05	Padi	Tadah Hujan
P06	Padi	Tadah Hujan
P07	Padi	Tadah Hujan
P08	Padi	Tadah Hujan
P09	Padi	Tadah Hujan

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner, Tahun 2025

Permasalahan yang terjadi pada lahan pertanian di Kelurahan Sapugarut yaitu berkaitan dengan kesejahteraan petani dan produktivitas hasil pertaniannya. Permasalahan terkait penurunan kualitas lahan yang terjadi di Kelurahan Sapugarut ini dapat menghambat produktivitas pertaniannya, yang mana diakibatkan oleh adanya pencemaran limbah domestik dan industri, yang mana pencemaran air limbah ini timbul akibat adanya perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kelurahan Sapugarut, yaitu dengan banyaknya lahan pertanian yang berubah menjadi lahan industri, sehingga menyebabkan permasalahan ini timbul. Perubahan penggunaan lahan ini juga menimbulkan permasalahan lain seperti terganggunya sirkulasi udara dan pencahayaan alami yang dibutuhkan oleh tanaman yang diakibatkan oleh pembangunan permukiman di sekitar lahan pertanian, selain itu permasalahan terkait genangan air pada lahan pertanian juga menjadi penyebab dari pengurangan produktivitas pertanian di Kelurahan Sapugarut. Permasalahan lain yang terjadi di Kelurahan Sapugarut yaitu kurangnya kegiatan rotasi tanaman yang dilakukan oleh petani, juga kurangnya pendampingan teknis dan akses pertanian modern di Kelurahan Sapugarut yang mana dapat menghambat adaptasi petani terhadap pertanian yang berkelanjutan.

3.5.2 Kesejahteraan Petani

Sektor pertanian merupakan salah satu mata pencaharian yang dapat bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat, utamanya dalam penyediaan pangan di suatu wilayah salah satunya yaitu di Kecamatan Buaran. Kesejahteraan petani menjadi hal penting dalam sektor pertanian, karena petani berkontribusi besar dalam pemenuhan kebutuhan pangan suatu wilayah salah satunya yaitu di Kecamatan Buaran. Pekerjaan para petani tentunya tidak hanya menanam dan panen hasil tani saja, akan tetapi juga terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti ketersediaan lahan pertanian, ketersediaan pupuk, benih, sarana pengairan, harga produksi, fluktuasi harga panen dan sebagainya. Tantangan yang dihadapi oleh petani tentunya diperhatikan oleh pemerintah setempat, oleh karena itu dilakukannya kegiatan untuk membantu mensejahterakan petani di Kecamatan Buaran, yaitu seperti dilakukannya penyuluhan, bantuan benih maupun pupuk, dan sebagainya. Lahan pertanian

paling sedikit di Kecamatan Buaran yaitu berada di Kelurahan Sapugarut, yang dimana hal ini juga dapat mempengaruhi kesejahteraan petani di Kelurahan Sapugarut. Kesejahteraan petani di Kelurahan Sapugarut ini dapat dinilai dari harga produksi serta harga panen para petani, akan tetapi dapat juga dilihat pada faktor lain yaitu dengan adanya bantuan benih dari pemerintah, berikut merupakan **Tabel III.7** terkait benih dan masa tanam pada sektor pertanian di Kelurahan Sapugarut.

Tabel III.7 Subsidi Pupuk Kelurahan Sapugarut, Tahun 2025

Kelompok Tani	Alokasi Pupuk Bersubsidi (Kg)					
	Urea			NPK		
	MT 1	MT 2	Total	MT 1	MT 2	Total
Sapugarut	158	158	316	175	175	350
	113	113	226	125	125	250
	90	90	180	100	100	200
	113	113	226	125	125	250
	135	135	270	150	150	300
	158	158	316	175	175	350
	158	158	316	175	175	350
	113	113	226	125	125	250
	90	90	180	100	100	200

Sumber: Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Buaran, Tahun 2025

Kelompok tani Sapugarut yang di dalamnya terdapat 9 petani di 2025 dari jumlah sebelumnya pada tahun 2018 yang mencapai 13 petani, oleh karena itu pertanian di Kelurahan Sapugarut ini para petani diberikan subsidi 2 pilihan subsidi pupuk untuk 2 masa tanam, mengingat lahan pertanian di Kelurahan Sapugarut yang merupakan lahan tadah hujan, sehingga curah hujan dapat di Kelurahan Sapugarut sangat mempengaruhi masa tanam di kelurahan tersebut. Pemberian subsidi pupuk ini merupakan upaya pemerintah untuk mendukung produktivitas pertanian serta kesejahteraan petani di Kelurahan Sapugarut. Pemberian pupuk di Kelurahan Sapugarut ini tentunya melalui mekanisme yang telah ditetapkan, yang dimana para petani yang telah bergabung pada kelompok tani akan mendapatkan pupuk dengan harga yang terjangkau, sehingga dapat meringankan biaya produksi para petani di Kelurahan Sapugarut.

Pupuk yang diberikan terdiri dari dua jenis, yaitu Urea dan NPK, yang dialokasikan untuk dua masa tanam. Kelompok tani menerima jumlah pupuk yang bervariasi, tergantung dari luas lahan serta kebutuhan dari lahan pertanian masing-masing. Jumlah pupuk yang diberikan pada setiap masa tanam relatif sama, yang dimana menunjukkan adanya pola distribusi yang merata untuk mendukung produktivitas pertanian di wilayah tersebut. Pemberian pupuk ini diberikan dalam waktu satu tahun atau 2 kali masa tanam, hal ini berkaitan dengan jenis lahan pertanian tadah hujan di Kelurahan Sapugarut, sehingga alokasi pendistribusian pupuk ini hanya terbagi menjadi 2 masa tanam saja. Pendistribusian pupuk ini bertujuan untuk meningkatkan hasil pertanian di Kelurahan Sapugarut.